



Penataan dan Pembinaan UMKM di Desa Firdaus untuk Peningkatan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai

Structuring and Fostering MSMEs in Firdaus Village for Economic Improvement of Serdang Bedagai Regency

Budiman Bonar Alexander Panjaitan*, Badaruddin & Zulkifli

Program Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program penataan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Firdaus, Kabupaten Serdang Bedagai, serta menganalisis respon dan strategi pelaku UMKM dalam menghadapi program tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pelatihan, pendampingan legalitas, dan fasilitasi permodalan, efektivitas implementasi masih terbatas akibat hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi pelaku usaha, serta lemahnya sinergi antar-stakeholder. Respon pelaku UMKM sangat bervariasi, mulai dari antusias hingga skeptis, tergantung pada latar belakang dan pengalaman mereka. Strategi yang dikembangkan pelaku usaha meliputi adaptasi terhadap kebijakan, kolaborasi komunitas, inovasi produk, efisiensi operasional, hingga penguatan relasi sosial dengan pemerintah. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan pembinaan yang lebih partisipatif, berbasis kebutuhan lokal, dan didukung oleh kebijakan yang konsisten serta sistem pendampingan yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan UMKM secara inklusif dan berdaya saing.

Kata kunci: UMKM; Pembinaan; Strategi Adaptif; Serdang Bedagai.

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the program for structuring and fostering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Firdaus Village, Serdang Bedagai Regency, as well as to analyze the response and strategies of MSME actors in dealing with the program. Using a descriptive qualitative approach, data was obtained through in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that although local governments have implemented various training programs, legality assistance, and capital facilitation, the effectiveness of implementation is still limited due to structural obstacles such as budget limitations, lack of participation of business actors, and weak synergy between stakeholders. The response of MSME actors varies widely, ranging from enthusiastic to skeptical, depending on their background and experience. The strategies developed by business actors include adaptation to policies, community collaboration, product innovation, operational efficiency, and strengthening social relations with the government. These findings emphasize the importance of a more participatory coaching approach, based on local needs, and supported by consistent policies and a sustainable mentoring system to encourage inclusive and competitive growth of MSMEs.

Keywords: MSMEs; Coaching; Adaptive Strategies; Serdang Bedagai.

How to Cite: Panjaitan, B.B.A., Badaruddin & Zulkifli (2025). Penataan dan Pembinaan UMKM di Desa Firdaus untuk Peningkatan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(2): 10-20

*E-mail: ayuutamivivo2017@gmail.com

ISSN 2721-7507 (Online)



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, serta pembangunan ekonomi lokal (DJPB, 2024; Tambunan, 2019; Yulianto, 2023). Peran strategis UMKM menjadi semakin penting di tengah tantangan ketimpangan pembangunan antarwilayah dan keterbatasan akses masyarakat terhadap sektor formal. Di berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan, UMKM menjadi solusi nyata bagi kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk tetap bertahan dan berkembang secara mandiri (Eka et al., 2022; Kemenkeu RI, 2022; Munizu et al., 2023). Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan teknis yang menghambat pertumbuhan usaha mereka secara optimal. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari dalam diri pelaku usaha, tetapi juga dari lingkungan eksternal, termasuk kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka secara konkret (Juan et al., 2024; Kurniawan, R. H., & Wijaya, 2020; Lestari, P. A., & Sudrajat, 2023).

Desa Firdaus di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, merupakan salah satu wilayah yang memiliki konsentrasi pelaku UMKM yang cukup tinggi. Sebagian besar UMKM di desa ini bergerak di sektor perdagangan kecil, industri rumah tangga, serta jasa informal. Pemerintah daerah telah menggulirkan berbagai program penataan dan pembinaan, seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi perizinan, pendampingan manajemen usaha, dan penyediaan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang menempatkan UMKM sebagai aktor utama penggerak ekonomi kerakyatan. Namun, meskipun berbagai program tersebut telah diimplementasikan, hasil yang dicapai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam hal produktivitas, daya saing, maupun keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.

Hambatan yang dialami UMKM secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi rendahnya kapasitas manajerial, keterbatasan modal usaha, minimnya inovasi produk, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (Anggraini et al., 2023; Hapsari, N. D., & Rahardjo, 2021; Octiva et al., 2024). Di sisi lain, hambatan eksternal mencakup kompleksitas regulasi, kurangnya sinergi dengan lembaga keuangan, birokrasi yang lambat, serta infrastruktur penunjang yang belum memadai (Dayanti et al., 2024; Diani & Lubis, 2022; Nadeak, 2023). Mahpuz et al. (2021) menekankan pentingnya pembinaan berbasis teknologi untuk mengatasi hambatan internal UMKM. Sementara itu, Setiawan et al. (2024) menyoroti perlunya penataan lokasi dan strategi keuangan yang komprehensif sebagai fondasi pertumbuhan UMKM. Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi UMKM bersifat multidimensi dan memerlukan strategi intervensi yang bersifat lintas sektor dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM, dari total 15.672 UMKM yang terdaftar, hanya 35% yang mengikuti pelatihan dan pembinaan, sementara penyaluran KUR hanya terealisasi sebesar 42,5% dari total alokasi (Disnakerkop, 2021). Data ini menunjukkan adanya ketimpangan antara rancangan kebijakan dan tingkat partisipasi pelaku UMKM. Hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya pendidikan formal pelaku usaha (hanya 45% berpendidikan SMP ke bawah), serta kurangnya pemanfaatan teknologi digital (hanya 20% menggunakan pemasaran online). Selain itu, aspek legalitas usaha juga menjadi kendala serius, dengan hanya 35% pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha resmi.

Temuan dalam penelitian tersebut mengindikasikan adanya persoalan struktural dan kultural dalam pengelolaan program penataan UMKM. Di satu sisi, desain program pemerintah

cenderung *top-down* dan tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan riil pelaku usaha (Pradinata, 2023; Putri, A. M., & Nugraha, 2020). Di sisi lain, pelaku UMKM juga masih menunjukkan resistensi terhadap pendekatan baru, seperti pemasaran digital atau pencatatan keuangan berbasis aplikasi. Persoalan ini semakin kompleks ketika tidak terdapat jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan UMKM sebagai pelaku utama. Dalam kondisi seperti ini, peran strategi adaptif dari UMKM menjadi sangat penting sebagai bentuk respons terhadap ketidakefektifan sistem pembinaan formal.

Sayangnya, sebagian besar kajian sebelumnya lebih berfokus pada evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembinaan, dan belum banyak mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pelaku UMKM merespons, meniyasati, dan bertahan dalam kondisi tersebut. Gap penelitian inilah yang menjadi pijakan penting dalam subbab ini. Diperlukan analisis yang tidak hanya melihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi layanan, tetapi juga dari sisi pelaku UMKM sebagai penerima manfaat sekaligus aktor yang menentukan keberhasilan program secara nyata di lapangan. Respons pelaku UMKM terhadap pembinaan, serta strategi bertahan dan berkembang yang mereka jalankan, merupakan aspek yang perlu digali secara lebih serius agar kebijakan ke depan bisa lebih kontekstual dan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Firdaus dalam mengikuti program penataan dan pembinaan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi yang dijalankan oleh pelaku UMKM secara mandiri atau kolektif dalam merespons keterbatasan tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan berbasis pada realitas di lapangan, sehingga pembinaan UMKM tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi penataan dan pembinaan UMKM di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena dinilai memiliki dinamika UMKM yang representatif dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Informan utama meliputi pelaku UMKM, perangkat desa, serta pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai, yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan pertimbangan keterlibatan langsung dalam program pembinaan dan penataan UMKM.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen kunci, dilengkapi dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Keabsahan data diperkuat dengan keterlibatan langsung peneliti di lapangan, pengujian kredibilitas melalui konfirmasi ulang kepada informan, serta pencatatan sistematis seluruh temuan. Seluruh proses penelitian dilakukan selama periode waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan dengan informan dan pemangku kepentingan lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika kebijakan pembinaan dan penataan UMKM serta respons pelaku usaha terhadap program pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Penataan dan Pembinaan UMKM oleh Pemerintah Daerah

Program penataan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah daerah merupakan bagian strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, program ini menjadi bagian dari inisiatif pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Evaluasi terhadap pelaksanaan program ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan implementasi yang dilakukan mampu menyentuh kebutuhan nyata pelaku UMKM, serta bagaimana dampaknya terhadap penguatan struktur ekonomi desa.

Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM serta aparat desa telah menjalankan sejumlah langkah untuk membina dan menata pelaku UMKM. Program pembinaan meliputi pelatihan manajemen usaha, penyuluhan kewirausahaan, pendampingan perizinan usaha, serta fasilitasi akses permodalan. Sementara penataan UMKM berfokus pada pengelompokan usaha per sektor, pembentukan sentra usaha, dan penataan ruang usaha yang lebih terorganisir. Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi desa yang produktif dan mandiri.

Namun, dari evaluasi kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, ditemukan bahwa efektivitas program masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran yang mengakibatkan intensitas pembinaan dan jumlah peserta pelatihan menjadi terbatas. Beberapa pelaku UMKM menyampaikan bahwa pelatihan yang diberikan bersifat umum dan tidak spesifik menjawab kebutuhan teknis mereka. Hal ini menunjukkan kurangnya riset kebutuhan (need assessment) yang mendalam sebelum merancang materi pembinaan.

Selain itu, kendala lain yang ditemukan adalah rendahnya partisipasi aktif pelaku UMKM dalam program yang diselenggarakan. Kurangnya motivasi, informasi yang tidak menyebar secara merata, serta waktu pelaksanaan yang tidak fleksibel menjadi penyebab utama rendahnya keikutsertaan pelaku usaha. Faktor ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah daerah masih bersifat top-down, di mana inisiatif lebih banyak datang dari pihak birokrasi, bukan dari aspirasi komunitas usaha itu sendiri.

Evaluasi program penataan juga mengungkap adanya ketimpangan dalam penataan ruang usaha. Beberapa pedagang mengaku telah dipindahkan ke lokasi yang tidak strategis sehingga menurunkan omzet penjualan. Sementara itu, sebagian lainnya memperoleh akses lokasi strategis karena kedekatan dengan aparat atau jaringan tertentu. Hal ini mencerminkan masih lemahnya prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penataan UMKM di tingkat lokal.

Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa beberapa intervensi program telah memberikan hasil positif. Misalnya, pelaku UMKM yang aktif mengikuti pelatihan manajemen usaha menunjukkan peningkatan dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan stok barang. Program bantuan peralatan usaha juga dinilai cukup membantu meningkatkan kapasitas produksi. Namun, bantuan tersebut belum merata dan seringkali tidak tepat sasaran, terutama bagi usaha yang belum terdaftar secara resmi.

Dalam hal pendampingan legalitas usaha, pemerintah daerah bekerja sama dengan dinas terkait telah membuka layanan perizinan terpadu di desa. Upaya ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), meskipun sebagian pelaku masih menganggap proses tersebut rumit dan memerlukan biaya tidak resmi. Ini menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik agar lebih ramah bagi pelaku usaha kecil.

Evaluasi juga menyoroti lemahnya sinergi antar stakeholder dalam mendukung ekosistem UMKM. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas lokal belum berjalan optimal. Beberapa program pembinaan yang dilaksanakan oleh instansi berbeda seringkali tumpang tindih atau tidak saling melengkapi. Idealnya, pengembangan UMKM harus dirancang dalam kerangka kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan multipihak secara terpadu.

Dari sisi monitoring dan evaluasi program, pemerintah daerah dinilai belum memiliki indikator kinerja yang terukur dalam menilai dampak pembinaan dan penataan UMKM. Akibatnya, keberhasilan program sering hanya dinilai dari sisi administratif seperti jumlah kegiatan atau peserta, bukan dari capaian nyata seperti peningkatan pendapatan usaha, daya saing produk, atau keterlibatan pasar digital. Dibutuhkan sistem evaluasi berbasis *outcome* untuk memastikan bahwa program benar-benar memberikan perubahan signifikan bagi pelaku UMKM.

Program pembinaan yang terintegrasi dengan digitalisasi usaha juga belum terlihat secara masif. Padahal, tren transformasi digital telah membuka peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Firdaus masih menjalankan usahanya secara konvensional, tanpa memanfaatkan platform digital untuk promosi, transaksi, maupun pencatatan usaha. Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan insentif untuk mendukung digitalisasi UMKM sebagai bagian dari strategi pembinaan jangka panjang.

Dari sisi regulasi, belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pemberdayaan UMKM di tingkat desa menjadi kelemahan dalam kerangka hukum dan kelembagaan. Keberadaan Perda dapat menjadi landasan yuridis untuk penganggaran dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, pembentukan koperasi atau forum UMKM lokal sebagai wadah pengorganisasian pelaku usaha juga belum berkembang secara optimal. Ketiadaan organisasi formal membuat advokasi kepentingan UMKM menjadi lemah.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, keberhasilan penataan dan pembinaan UMKM seharusnya tercermin dalam meningkatnya kontribusi sektor informal terhadap pendapatan desa, perluasan lapangan kerja, dan berkurangnya ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang roadmap pembinaan UMKM yang berorientasi pada kemandirian, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Pendekatan partisipatif, riset berbasis data, serta penguatan kelembagaan lokal menjadi prasyarat keberhasilan program di masa depan.

Respon UMKM terhadap Pembinaan Pemerintah

Pelaksanaan program pembinaan UMKM oleh pemerintah daerah, khususnya di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, mendapatkan beragam respon dari para pelaku usaha. Respon tersebut terbentuk sebagai cerminan dari persepsi, pengalaman, serta ekspektasi pelaku UMKM terhadap intervensi yang diberikan. Dalam konteks ini, respon UMKM bukanlah sesuatu yang bersifat homogen, melainkan menunjukkan spektrum yang luas dari antusiasme hingga resistensi, tergantung pada latar belakang sosial, jenis usaha, dan pengalaman masing-masing pelaku.

1. Respon Positif: Antusiasme Terhadap Peluang Pengembangan Usaha

Sebagian pelaku UMKM menyambut positif program pembinaan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Mereka melihat program tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor usaha kecil yang selama ini beroperasi secara informal dan sering kali termarjinalkan. Pelatihan manajemen usaha, pendampingan legalitas, serta bantuan alat produksi dianggap sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas bisnis yang selama ini dijalankan secara tradisional.

Antusiasme ini umumnya muncul dari pelaku UMKM yang sudah memiliki orientasi pengembangan usaha jangka panjang. Mereka menunjukkan keinginan untuk naik kelas, baik dari sisi skala produksi, jangkauan pasar, maupun kualitas layanan. Respon positif juga diperlihatkan oleh pelaku usaha yang memiliki latar belakang pendidikan cukup baik, atau mereka yang pernah mengikuti program pelatihan serupa sebelumnya dan merasakan dampaknya terhadap peningkatan kinerja usaha. Kelompok ini biasanya lebih siap menyerap materi pelatihan dan menerapkannya dalam operasional bisnis mereka.

Salah satu bentuk nyata dari respon positif ini terlihat pada meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Serdang Bedagai. Mereka tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga aktif bertanya, mencatat, dan bahkan membentuk komunitas alumni pelatihan untuk menjaga kesinambungan diskusi dan saling berbagi pengalaman. Beberapa pelaku bahkan melaporkan adanya peningkatan pendapatan pasca pelatihan karena mereka mampu menerapkan strategi pemasaran dan pencatatan keuangan yang lebih sistematis.

2. Respon Pasif: Ketergantungan dan Minim Inisiatif

Di sisi lain, terdapat kelompok pelaku UMKM yang menunjukkan respon pasif terhadap pembinaan yang diberikan pemerintah. Mereka hadir dalam kegiatan pelatihan atau sosialisasi semata-mata karena diundang oleh pihak desa atau demi menjaga hubungan baik dengan aparat setempat. Dalam banyak kasus, mereka mengikuti kegiatan tanpa antusiasme, tidak mencatat materi yang disampaikan, dan tidak melakukan tindak lanjut setelah kegiatan selesai.

Kelompok ini cenderung memiliki karakteristik usaha subsisten, yaitu usaha yang dijalankan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa ada rencana ekspansi atau peningkatan kapasitas. Dalam pandangan mereka, program pemerintah adalah kegiatan seremonial yang tidak banyak membawa perubahan konkret terhadap kehidupan ekonomi mereka. Bahkan beberapa pelaku mengaku bahwa mereka hanya mengikuti program jika ada insentif langsung, seperti konsumsi, bantuan sembako, atau uang transportasi.

Respon pasif ini juga terkait dengan tingkat literasi dan keterbatasan akses informasi. Pelaku UMKM yang berusia lanjut, berpendidikan rendah, atau belum familiar dengan teknologi digital merasa kesulitan untuk memahami substansi pembinaan. Mereka lebih nyaman menjalankan usaha berdasarkan pengalaman dan kebiasaan lama, serta enggan mencoba hal-hal baru yang ditawarkan oleh program pembinaan.

3. Respon Skeptis: Kekecewaan terhadap Program yang Tidak Konsisten

Skeptisisme terhadap program pembinaan muncul dari pelaku UMKM yang pernah memiliki pengalaman negatif terhadap program sebelumnya. Beberapa pelaku usaha mengungkapkan kekecewaan karena pernah dijanjikan bantuan alat yang tidak kunjung datang, atau karena pelatihan yang diberikan tidak relevan dengan jenis usaha mereka. Ada pula yang merasa bahwa program pembinaan hanya menguntungkan sebagian kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparat desa atau petugas dinas.

Dalam wawancara mendalam, pelaku UMKM menyebut bahwa bantuan seringkali diberikan tidak merata. Mereka mempertanyakan mekanisme seleksi penerima bantuan yang dianggap tidak transparan. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan terhadap motivasi dan keseriusan pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM. Respon ini menyebabkan sebagian pelaku usaha enggan mengikuti program lanjutan meskipun mereka sebenarnya membutuhkan pembinaan.

Skeptisisme juga diperkuat oleh minimnya dampak nyata dari program yang telah diikuti. Pelaku UMKM mengeluhkan bahwa meskipun telah mengikuti pelatihan berulang kali, mereka tetap tidak mampu memperluas pasar, mengakses permodalan, atau meningkatkan produktivitas.

Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan bersifat normatif dan tidak didukung oleh sistem pendampingan berkelanjutan.

4. Respon Selektif: Pemilihan Program Berdasarkan Kebutuhan

Respons lain yang cukup menarik adalah munculnya sikap selektif dari pelaku UMKM dalam memilih program pembinaan yang ingin mereka ikuti. Mereka tidak serta-merta menolak semua program pemerintah, namun memilih program yang dianggap paling relevan dengan kondisi dan kebutuhan usaha mereka. Misalnya, pelaku usaha makanan rumahan lebih tertarik pada pelatihan sertifikasi halal atau pelatihan pengemasan produk, dibandingkan pelatihan manajemen keuangan yang dianggap terlalu rumit.

Sikap selektif ini merupakan bentuk rasionalitas ekonomi dari pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya. Mereka ingin memastikan bahwa program yang mereka ikuti memberikan nilai tambah yang konkret bagi usaha mereka. Oleh karena itu, pelatihan berbasis praktik, demo usaha, atau sesi konsultasi langsung lebih diminati dibandingkan dengan seminar umum yang bersifat teoritis.

Pemerintah daerah perlu mengapresiasi dan merespons sikap selektif ini dengan menyediakan variasi program yang berbasis kluster usaha dan level kematangan bisnis. Program pembinaan tidak bisa disamaratakan karena kebutuhan pelaku UMKM sangat beragam. Mereka yang baru merintis usaha membutuhkan dukungan yang berbeda dengan pelaku yang sudah mapan dan ingin mengembangkan ekspansi pasar digital.

5. Respon Komunitas: Pembentukan Solidaritas Sosial Antar Pelaku UMKM

Selain respon individual, terdapat pula respon kolektif dari komunitas UMKM yang terbentuk secara organik. Beberapa pelaku usaha di Desa Firdaus membentuk kelompok informal sebagai wadah saling berbagi informasi program, berbagi alat produksi, hingga kerja sama pemasaran. Komunitas ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan akses terhadap program pemerintah yang bersifat terbatas dan tidak bisa mencakup semua pelaku usaha.

Dalam komunitas ini, pelaku UMKM yang pernah mengikuti pelatihan pemerintah menjadi agen informasi bagi anggota lain. Mereka membantu menyebarkan materi pelatihan, berbagi pengalaman mengurus legalitas usaha, serta memberikan informasi terkait peluang pasar. Keberadaan komunitas ini memperkuat solidaritas sosial dan menjadi bukti bahwa pelaku UMKM memiliki kapasitas untuk saling memberdayakan di luar struktur formal pemerintahan.

Respon komunitas ini menjadi potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai mitra dalam menyelenggarakan program pembinaan. Pemerintah dapat memperkuat kapasitas komunitas ini dengan memberikan pengakuan, insentif, serta akses terhadap pelatihan yang lebih luas. Kolaborasi antara komunitas dan pemerintah akan meningkatkan efektivitas pembinaan sekaligus memperluas jangkauan dampak program.

Strategi UMKM dalam Menghadapi Pembinaan Pemerintah

Dalam merespons berbagai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah tidak bersikap pasif. Mereka mengembangkan beragam strategi untuk menyesuaikan diri, memanfaatkan peluang, sekaligus mengatasi tantangan yang muncul dari implementasi program tersebut. Strategi yang diterapkan pelaku UMKM sangat beragam, mulai dari yang bersifat adaptif, kolaboratif, hingga inovatif, bergantung pada kapasitas sumber daya yang dimiliki serta pengalaman mereka dalam dunia usaha.

1. Strategi Adaptif: Menyesuaikan Diri dengan Sistem dan Birokrasi

Strategi adaptif merupakan upaya UMKM untuk bertahan dan berkembang dengan menyesuaikan diri terhadap sistem dan kebijakan pembinaan pemerintah. Salah satu bentuk

strategi ini adalah kesediaan pelaku usaha untuk mengikuti prosedur legalitas, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi produk. Meskipun beberapa pelaku menganggap proses tersebut rumit dan melelahkan, mereka tetap menyesuaikan diri karena menyadari pentingnya legalitas sebagai syarat mendapatkan akses bantuan dan program resmi dari pemerintah.

Pelaku UMKM juga melakukan penyesuaian dalam bentuk pengaturan waktu dan tenaga agar tetap dapat mengikuti kegiatan pelatihan atau sosialisasi. Dalam kondisi mereka yang harus tetap menjalankan usaha harian, strategi seperti mengirim perwakilan dari keluarga (istri, anak, atau saudara) untuk hadir di kegiatan pelatihan menjadi langkah praktis yang cukup efektif. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk tidak sepenuhnya absen dari proses pembinaan meskipun dengan cara yang lebih fleksibel.

Strategi adaptif lainnya adalah belajar secara mandiri setelah mengikuti pelatihan. Pelaku UMKM menyadari bahwa waktu pelatihan terbatas dan tidak selalu menjawab seluruh kebutuhan usaha mereka. Oleh karena itu, mereka mencari tambahan informasi melalui internet, video tutorial, atau bertanya kepada sesama pelaku usaha yang lebih berpengalaman. Inisiatif ini menandakan bahwa UMKM memiliki kemampuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan melalui strategi belajar mandiri.

2. Strategi Kolaboratif: Membangun Jejaring dan Solidaritas Usaha

Strategi kolaboratif menjadi salah satu pola paling menonjol yang dikembangkan pelaku UMKM di Desa Firdaus. Mereka menyadari bahwa keterbatasan individu dapat diatasi dengan membangun jejaring antar pelaku usaha. Melalui forum informal seperti kelompok pedagang pasar, komunitas pengusaha rumahan, dan jaringan sosial berbasis RT/RW, mereka saling berbagi informasi mengenai program pemerintah, peluang bantuan, serta pengalaman mengurus administrasi.

Bentuk nyata dari strategi kolaboratif ini adalah sistem iuran gotong royong untuk membiayai keperluan kolektif, seperti biaya mengundang narasumber pelatihan, mencetak label produk, hingga membuat spanduk promosi bersama. Kolaborasi ini juga tampak dalam pengelolaan distribusi barang antar pelaku UMKM, di mana mereka saling menitipkan produk untuk dijual di gerai milik anggota lain. Strategi ini memperluas jangkauan pasar dan menurunkan biaya promosi individu.

Beberapa pelaku UMKM juga membentuk kelompok arisan modal, di mana dana yang terkumpul secara bergilir digunakan sebagai tambahan modal usaha. Praktik ini mencerminkan budaya kolektif lokal yang dimodifikasi untuk mendukung kebutuhan ekonomi komunitas UMKM. Strategi kolaboratif ini tidak hanya mengatasi keterbatasan modal, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antar pelaku usaha kecil.

3. Strategi Inovatif: Menyesuaikan Produk dan Model Usaha

UMKM di Desa Firdaus menunjukkan kemampuan untuk berinovasi, terutama dalam aspek pengembangan produk dan strategi pemasaran. Setelah mengikuti pelatihan dari pemerintah, sebagian pelaku UMKM mulai menerapkan teknik pengemasan baru, membuat label yang lebih menarik, serta menambahkan variasi rasa atau ukuran pada produk makanan dan kerajinan mereka. Inovasi ini tidak terlepas dari upaya mereka untuk menyesuaikan dengan tren pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Beberapa pelaku usaha juga mencoba model penjualan daring secara sederhana. Mereka memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk, menerima pesanan, dan mengatur sistem pengantaran barang. Strategi ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan ruang usaha fisik serta perubahan perilaku konsumen yang

semakin digital. Meskipun masih sederhana dan belum seluruhnya terdigitalisasi, strategi ini menjadi langkah awal menuju transformasi digital UMKM desa.

Strategi inovatif lainnya adalah integrasi usaha dengan kegiatan sosial dan budaya setempat. Misalnya, pelaku UMKM memanfaatkan momen acara desa seperti pengajian, pesta adat, atau perayaan hari besar nasional sebagai ajang promosi dan penjualan produk. Mereka membuat paket produk khusus yang disesuaikan dengan tema acara, seperti parcel lebaran, paket snack ulang tahun, atau oleh-oleh khas lokal. Strategi ini menunjukkan kemampuan UMKM untuk membaca peluang pasar berbasis waktu dan konteks budaya lokal.

4. Strategi Bertahan: Meningkatkan Efisiensi Operasional

Di tengah berbagai tantangan, pelaku UMKM juga mengembangkan strategi bertahan agar usaha tetap berjalan meskipun pembinaan dari pemerintah tidak sepenuhnya efektif atau menyentuh kebutuhan mereka. Strategi ini meliputi efisiensi biaya operasional, penggunaan kembali bahan bekas yang layak pakai, pengurangan jam kerja pada saat sepi, serta pengaturan ulang stok agar tidak terjadi pemborosan.

Beberapa pelaku UMKM juga menerapkan sistem kerja keluarga, di mana seluruh anggota rumah tangga terlibat dalam proses produksi dan distribusi tanpa perlu membayar upah tambahan. Strategi ini menekan biaya tenaga kerja dan sekaligus memperkuat solidaritas internal keluarga sebagai unit produksi. Selain itu, pelaku usaha juga melakukan pencatatan manual sederhana untuk mengontrol arus kas dan mencegah kerugian akibat pengeluaran tidak terencana.

Strategi bertahan ini merupakan refleksi dari kemampuan manajerial dasar yang dimiliki UMKM, meskipun belum sepenuhnya profesional. Jika diberikan pelatihan manajemen lanjutan yang sesuai konteks lokal, strategi ini dapat berkembang menjadi praktik kewirausahaan yang lebih sistematis dan berorientasi pada pertumbuhan.

5. Strategi Emosional dan Sosial: Menjaga Relasi dengan Pemerintah

Menariknya, beberapa pelaku UMKM juga menjalankan strategi emosional dalam berinteraksi dengan pemerintah desa atau petugas dari dinas terkait. Mereka menjaga hubungan baik dengan aparat setempat agar tetap mendapatkan informasi dan peluang program pembinaan. Strategi ini mencakup sikap sopan santun, kesediaan menghadiri undangan resmi, hingga memberikan bantuan logistik saat ada kegiatan desa.

Relasi sosial ini sering kali berfungsi sebagai jembatan informal yang mempermudah akses terhadap program pemerintah. Pelaku UMKM yang memiliki relasi baik dengan pihak desa cenderung lebih dulu mengetahui adanya pelatihan, bantuan alat, atau distribusi modal. Meskipun strategi ini terkadang menimbulkan kesan eksklusivitas, faktanya relasi sosial menjadi bagian integral dari strategi bertahan dan berkembang dalam konteks desa.

SIMPULAN

Program penataan dan pembinaan UMKM oleh pemerintah daerah di Desa Firdaus menunjukkan upaya serius dalam membangun ekonomi lokal, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi pelaku usaha, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Pelatihan bersifat umum dan tidak sesuai kebutuhan teknis UMKM, sementara pembagian lokasi usaha dan bantuan dinilai tidak adil. Meski ada kemajuan dalam legalitas usaha dan peningkatan kapasitas produksi, masih dibutuhkan pendekatan berbasis kebutuhan, sinergi multipihak, digitalisasi, serta kerangka hukum yang kuat agar program pembinaan lebih berdampak dan berkelanjutan.

Respon UMKM terhadap program pembinaan pemerintah di Desa Firdaus sangat beragam, mulai dari antusiasme terhadap peluang pengembangan usaha, sikap pasif karena ketergantungan

dan keterbatasan literasi, hingga skeptisisme akibat ketidaksesuaian dan ketidakadilan program. Sebagian pelaku usaha menunjukkan sikap selektif dalam memilih program yang relevan, serta membentuk komunitas informal untuk saling memberdayakan. Variasi respon ini menunjukkan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis klaster agar efektif menjangkau seluruh segmen UMKM.

UMKM di Desa Firdaus mengembangkan berbagai strategi untuk merespons pembinaan pemerintah, mencakup strategi adaptif dalam memenuhi birokrasi, strategi kolaboratif untuk memperkuat solidaritas, strategi inovatif untuk menyesuaikan produk dengan pasar, serta strategi bertahan guna efisiensi operasional. Selain itu, relasi sosial dan emosional dengan pemerintah menjadi cara untuk memperoleh akses informasi dan dukungan. Keberagaman strategi ini mencerminkan daya lenting UMKM dalam menghadapi keterbatasan, sekaligus menjadi dasar penting bagi desain kebijakan pembinaan yang lebih responsif dan kontekstual.

REFERENSI

- Anggraini, A., Wulandari, D., Utama, R. E., Jakarta, U. M., Selatan, T., & Teknologi, I. (2023). Strategi Inovasi Teknologi Terhadap Daya Saing UMKM. *Musyitari Jurnal Neraca Manajemen Ekonomi*, 2(2), 2-- 20.
- Dayanti, I., Latifah, S., & others. (2024). Manfaat dan Mudharat Marketplace Shopee Bagi UMKM di Daerah Medan Helvetia Menurut Perspektif Filsafat Bisnis Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4).
- Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1970–1981.
- Disnakerkop. (2021, September 27). *Tingkatkan Produktivitas Pelaku Usaha, IPEMI Sergai Gelar Pelatihan - Disnakerkop / Serdang Bedagai*. Disnakerkop.Serdangbedagaikab.Go.Id. <https://disnakerkop.serdangbedagaikab.go.id/2021/09/27/tingkatkan-produktivitas-pelaku-usaha-ipemi-sergai-gelar-pelatihan-%ef%bf%bc/>
- DJPB. (2024). *UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Eka, D., Diah, Y. M., Taufik, T., Bunga, C. A. C., Putriana, V. N., Febianti, D., Sari, D. P., Rosalinda, R., & Arifuddin, Z. (2022). Peranan Kompetensi SDM dalam Meningkatkan Industri UMKM di Kecamatan Ilir Barat II Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 3(1), 39–44. <https://doi.org/10.29259/jscs.v3i1.56>
- Hapsari, N. D., & Rahardjo, M. (2021). Peran teknologi finansial dalam meningkatkan akses kredit bagi UMKM. *Jurnal Teknologi Keuangan*, 6(1), 87-102.
- Juan, H., Wijoyo, S. H., & Maghfiroh, I. S. E. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Pelaku UMKM Kuliner di Kota Malang. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 8(7), 1–7.
- Kemenkeu RI. (2022). *Ini Upaya Pemerintah Jaga Peran UMKM sebagai Tulang Punggung Perekonomian*.
- Kurniawan, R. H., & Wijaya, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses UMKM terhadap Pendanaan Formal dan Informal di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 18(1), 23-38.
- Lestari, P. A., & Sudrajat, T. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan UMKM dalam menggunakan kredit bank. *Jurnal Riset Keuangan Dan Perbankan*, 10(2), 205-218.
- Mahpuz, M., Bahtiar, H., Fathurahman, F., & Nur, A. M. (2021). Pelatihan pembinaan UMKM berbasis Teknologi Informasi untuk meningkatkan SDM pelaku UMKM. *ABSARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 212–219. <https://doi.org/10.29408/ab.v2i2.4206>
- Munizu, M., Tandiono, R., Pravitasari, E., Kardini, N. L., Hendrawan, H., Nur, T., Siswanto, A., & Manuaba, I. B. K. (2023). *UMKM: Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nadeak, J. (2023). *Perancangan Tata Letak Fasilitas Produksi Menggunakan Metode Computerized Relationship Layout Planning (Corelap) Di Umkm Rumah Brike*.
- Octiva, C. S., Haes, P. E., Fajri, T. I., Eldo, H., & Hakim, M. L. (2024). Implementasi Teknologi Informasi pada UMKM: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 815–821.
- Pradinata, M. J. (2023). Eksistensi UMKM dalam Aspek Jaminan/Agunan Kredit serta Perlindungan Hukumnya dan Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Melaksanakan Pembagunan Ekonomi Nasional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2074–2082. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1596>

- Putri, A. M., & Nugraha, H. (2020). Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM melalui program kredit dan subsidi bunga. *Jurnal Kebijakan Ekonomi, 5(2), 98-110.*
- Setiawan, A., Jaurino, J., Sari, W., & Febriati, F. (2024). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Pada UMKM Di Kabupaten Kubu Raya. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 5(1), 101-110.*
<https://doi.org/10.36908/AKM.V5I1.1091>
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Masalah, dan Kebijakan Mendukung.*
- Yulianto, A. (2023). Analisis Risiko Finansial pada UMKM dengan Pinjaman Bank: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan, 13(2), 145-159.*